

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Civil Society dalam filsafat politiknya, yang berarti komunitas politik yang beradap, dan didalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri, di mana *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat *Cicero* yang memulai menggunakan istilah tersebut (Suroto, Universitas Mangkurat, 2015). Secara sejarah, keberadaan *civil society* bisa ditatap lebih tua dari Indonesia sebagai negeri bangsa yang berdiri tahun 1945. Di Indonesia *Civil Society* dimaksud sebagai warga madani yang ialah konsep merujuk pada warga yang sempat tumbuh di Madinah pada era Nabi Muhammad SAW, ialah warga yang mengacau pada nilai-nilai kebijakan universal, yang diucap al- khair. Menurut Asfar, (2001) konsep masyarakat madani digunakan untuk memahami gerakan demokratisasi yang bersifat universal, sebagaimana yang belakangan ini mendominasi wacana politik diberbagai negara.

Civil society dan demokrasi memiliki keterkaitan yang saling berhubungan, dimana warganegara bekerjasama membangun ikatan, jaringan sosial, dan solidaritas kemanusiaan yang sifatnya non-pemerintah (non-government) guna mencapai kebaikan bersama. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa *civil society* serta demokrasi bagaikan 2 sisi mata uang, sebab dalam *civil society* yang kuatlah demokrasi bisa berdiri dengan tegak serta kuat, begitu pula kebalikannya, hanya dalam atmosfer yang demokratislah *civil society* bisa tumbuh secara wajar (Agung & Rumtini Puslitjaknov, 2010). Pemerintahan yang demokratis idealnya bisa menghasilkan ruang korelasi serta berorganisasi untuk orang secara leluasa yang nantinya hendak mendesak warga sipil selaku suatu organisasi ataupun gerakan (Muradi, 2016)

Dalam penerapan program pemerintah, butuh didukung segala elemen pemerintahan terikat, pemerintah wilayah, warga serta pihak swasta. Dalam perkembangannya, *civil society organization (CSO)* timbul selaku wadah organisasi warga sipil tidak hanya *non-government*

organization (NGO). *Civil society organization* merupakan wadah yang cukup menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Ronasifah et al., (2019) Badan tersebut memiliki kekuatan politik yang kuat di Indonesia, dapat melakukan pengawasan untuk membentuk mekanisme *check and balances*, dan memiliki peran mengawasi semua kegiatan pemerintahan, serta berhak memprotes jika dianggap tidak sesuai dengan tujuan sosial. Indonesia memiliki Organisasi Masyarakat Sipil atau organisasi masyarakat Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang penting untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah besar yaitu *Covid-19* yang merupakan virus berbahaya dan banyak memakan korban, virus tersebut berasal dari Kota Wuhan Negeri China. Virus ini masuk ke Indonesia pada awal bulan maret yang diakibatkan oleh adanya kontak fisik antara guru dansa dari Indonesia dengan WNA Jepang. Pada tahun 2020 virus ini merupakan keluarga besar virus corona yang dapat menyerang hewan. Ketika virus corona menyerang manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti influenza, *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* (Setiawan, 2020). Menurut penelitian Tim Dosen Fakultas Kedokteran Unisba, (2020) pandemi *COVID-19* ditetapkan sebagai bencana kesehatan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* pada tanggal 31 Maret 2020.

Pandemi *Covid-19* termaksud bencana non alam yang menimbulkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia mulai dari sektor ekonomi, sosial, bahkan agama. Tidak dapat dipungkiri adanya virus tersebut menghambat aktifitas masyarakat mulai dari pekerjaan bahkan sampai aktifitas sekolah. Realita yang dihadapi saat ini menyebabkan banyak oknum-oknum bekerja keras untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Indonesia sangat dibutuhkan. Munculnya sistem *lockdown and social*

distancing merupakan reaksi sekaligus upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini (Bima Jati & Putra, 2020). Permasalahan ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi harus banyak melibatkan banyak pihak mulai dari pihak swasta, tenaga medis, akademisi, organisasi masyarakat, dan bahkan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah menyatakan jumlah kasus *Covid 19* di Indonesia terus meningkat karena penularan corona masih terjadi di masyarakat. Kondisi di Indonesia pada saat ini yaitu, *Covid-19* telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Eri Kurniawansyah HS*, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, 2020). Dilihat dari data yang dihimpun 12.00 WIB pada Sabtu pukul 12.00, saat ini terdapat 97.286 kasus *Covid-19* di tanah air, terhitung sejak perkara pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 (Kompas, 2020). Pada data yang diperoleh dari situs covid19.go.id memaparkan data bahwa di Indonesia untuk update tanggal 10 September 2020 pukul 12:00 terdapat 95.501 suspek, 207.203 konfirmasi, 34.909 spesimen, 147510 sembuh, dan 8.456 meninggal. Data tersebut akan terus berubah setiap harinya, mengingat virus *Covid 19* ini semakin banyak menyerang masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak sendiri. Ratusan Organisasi Masyarakat Sipil menghadapi tantangan yang sama mencoba menaklukkan *Covid-19*, tak terkecuali jurnalis dakwah harus berada di garda terdepan bersama MUI, Ormas-ormas Islam lainnya (Muslim & Gelorakan, 2020). Salah satu organisasi masyarakat yang ikut berkontribusi dalam penanganan covid yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai ormas dengan banyak jaringan dan model yang kuat, NU dan Muhammadiyah banyak membuka peluang untuk mengisi kekurangan kapasitas nasional di lembaga-lembaga nasional (Djuyandi et al., 2018). Kedua organisasi tersebut melakukan hal ini secara mandiri dengan mendirikan rumah sakit, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan lembaga berbasis keuangan (seperti lembaga simpan pinjam, amir zakat, dll).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam mendukung negara Indonesia memenangkan perang melawan pandemi Covid 19

(republika.co.id,2020). Kepercayaan masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap NU dan jaringan NU yang luas (yang bisa menjangkau akar rumput di dalam dan luar negeri) merupakan aset yang sangat penting dalam penanggulangan Covid-19. Nahdlatul Ulama memiliki tiga bidang diantaranya yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, dan Bidang Ekonomi. Pada bidang kesehatan merupakan suatu komponen yang penting, dimana alat-alat medis untuk saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Selain itu dalam bidang sosial, yaitu perlunya menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat mengenai penanggulangan Covid-19. Sedangkan bidang ekonomi sangat ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang terkena dampak covid-19.

Selain pemerintah dan organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) masih banyak lagi pihak-pihak yang ikut serta membantu dalam penanganan pandemi *covid-19*. *Covid-19* merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut (Telaumbanua, 2020). Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Pandemi *Covid-19* yang merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan (Dermawan, 2020). Pada penelitian Nugroho, (2020) setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease (COVID-19)* adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Menurut Penelitian Abudi et al., (2020) untuk membantu pemerintah dan pihak kesehatan menganalisis para pasiennya, maka setidaknya ada 4 (empat) sebutan orang terkait COVID-19, yaitu:

1. Orang Dalam Pemantauan (ODP).
2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
3. Orang Tanpa Gejala (OTG).
4. Positif COVID-19.

Berikut merupakan data laporan terkini dari web Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Yogyakarta Tanggap *Covid 19* mengenai penyebaran *Covid 19* pada tanggal 28 November 2020 (16:00 WIB).

Gambar 1. Data Penyebaran Covid 19 di DIY



Sumber Data: <https://corona.jogjaprovo.go.id/>

Penelitian ini menarik untuk diteliti mengingat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tersebar di Indonesia dengan jamaah kurang lebih 80 juta menjadi potensi civil society yang efektif, NU sebagaimana organisasi sosial ataupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya mempunyai potensi memperkuat civil society di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya (Noor et al. dalam Rawinarno, 2020). Selain itu Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 198 Pondok pesantren dalam naungan RMI Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di DIY. Menurut data diatas *Covid 19* semakin meningkat setiap harinya seperti gambar 1 diatas, oleh sebab itu pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat Islam dalam penanganan *covid 19*. Salah satunya Nahdlatul Ulama (NU), Menurut H. Fahmy Akbar Idries, SE, MM selaku Wakil Ketua PWNU menyebutkan bahwa pada saat awal-awal pandemi justru rumah sakit, klinik-klinik, puskesmas pemerinatahan ketika

kehabisan masker, ABD, dan meminta bantuan ke PWNU. Peran dari Nahdlatul Ulama berfokus pada dua peran yaitu Peran Politik dan Peran Non Politik, dimana dalam hal ini Peran apa saja yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dalam penanganan *Covid-19*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PWNU DIY sebagai organisasi Islam di Indonesia dalam mengatasi pandemi *Covid-19*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran PWNU DIY sebagai organisasi Islam di Indonesia dalam mengatasi pandemi *Covid-19*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah kasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk mengulas lebih dalam tentang kontribusi Nahdlatul Ulama dalam penanganan *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang paling utama adalah memberikan solusi kepada pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam penangan *covid-19* kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan.

1.5. Kajian Pustaka/Kerangka Teori

1.5.1. Kajian Pustaka

No	Penulis & Tahun	Judul	Temuan Penelitian
1.	(Solahudin et al., 2020)	Analisis kepemimpinan di Indonesia dalam kerangka tanggap-darurat <i>Covid-19</i> . Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Masa Work From Home Tahun 2020.	Setiap negara memberikan berbagai upaya dalam menangani penyebaran <i>Covid-19</i> termasuk di Indonesia. Dalam hal ini peran kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut, salah satunya Kepemimpinan Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Partisipasi yang dilakukan yaitu mengikuti aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, meliburkan beberapa kegiatan keagamaan seperti tahlil, dan pada bulan Ramdhan dianjurkan untuk melakukan ibadah dirumah masing-masing.
2.	(Ramdina et al., 2020)	Bersatu Melawan <i>Covid 19</i> Dengan Hidup Sehat Dalam Perspektif	Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan ormas yang membantu dalam penanganan <i>covid 19</i> hingga tingkat desa. Kedua ormas tersebut mengarahkan

		<p>Pendidikan Kewarganegaraan.</p>	<p>pembuatan masker untuk disebar kepada masyarakat secara gratis, menggunakan dengan optimal rumah sakit punya institusi sendiri-sendiri, pemerintah menyerahkan bantuan pangan jika tidak ada tindakan, dan melakukan penyuluhan tentang prosedur kesehatan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut.</p>
3.	(Aula, 2020)	<p>Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia</p>	<p>Dalam menghadapi pandemi <i>covid 19</i> Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung upaya pemerintah untuk melakukan <i>social-physical distance</i>. Bentuk aksi nyata yang telah dilakukan NU yaitu membentuk satgas <i>Covid-19</i> dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, juga memaksimalkan peran dari Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam proses pengumpulan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak, dan menyerukan kepada masyarakat untuk menyegerakan</p>

			dalam membayarkan Zakat di awal Ramadhan, hal tersebut karena jumlah masyarakat yang terdampak pandemi <i>Covid-19</i> meningkat dan membutuhkan bantuan logistik secepatnya.
4.	(Suherdiana et al., 2020)	Pesan Dakwah Ormas Islam Indonesia dalam Menghadapi Krisis Keagamaan Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .	Peran Ormas Islam dalam membantu penyelesaian masalah sosial Indonesia sejak <i>Covid 19</i> telah teruji oleh sejarah di seluruh Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Ormas Islam berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lembaga agamanya, termasuk menggunakan media untuk menyebarkan pesan dakwah. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ormas Nahdlatul Ulama (NU) memiliki jumlah pesan dakwah sebanyak 136(33%).
5.	(Hasbiyallah et al., 2020)	Fikih Corona (Studi Pandangan Ulama Indonesia terhadap Ibadah	Pada penelitian ini terjadi perbedaan pandangan mengenai pandemi <i>Covid-19</i> yaitu pandangan antara fatwa dan kelompok lainnya. Dimulai dengan masjid-masjid besar

		<p>dalam Kondisi Dharurat <i>Covid-19</i>)</p>	<p>yang ditutup oleh pemerintah di masyarakat, pandangan fatwa yang beragam, bahkan masjid-masjid yang ada di sekitar sudah mulai merespon dengan meniadakan salat Buddha dan salat Jumat serta kegiatan keagamaan di masjid. Semua aktivitas mereka lakukan di rumah. Tetapi menurut kelompok lain yang bereaksi terhadap hal-hal biasa, mereka mengatakan bahwa korona itu ketakutan, tetapi Tuhan yang menciptakan korona tidak. Bertindak seolah-olah virus berbahaya tidak pernah terjadi.</p>
6.	(Noor et al., 2020)	<p>Peran Masyarakat Sipil Keagamaan di Tengah Pandemi: Analisis Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid 19</i> di Indonesia.</p>	<p>Pada penelitian ini ada peran yang dilakukan oleh NU antara lain: Memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya terkait dengan berbagai pandangan tentang bahaya, cara penularan dan juga cara pencegahan <i>covid-19</i>. Kedua Organisasi NU tidak hanya memberikan edukasi secara umum saja, melainkan juga berperan dalam</p>

			<p>pendidikan yang terkait dengan pemahaman agama. Ketiga, peran yang di lakukan oleh organisasi NU yakni menjadi media dalam memupuk solidaritas dan persatuan yang dilakukan dengan memaksimalkan berbagai bidang layanan NU untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya, baik yang terkait dengan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, social kemasyarakatan.</p>
7.	(Rahmawati & Astuti, 2019)	<p><i>NGO and Community Empowerment Based on Local Wisdom (A Case Study of Spedagi NGO In Temanggung Central Java, 2018-2019)</i></p>	<p>Pada penelitian ini membahas mengenai adanya usaha pemberdayaan desa di pemerintahan Desa Ngadimulyo Temanggung melalui peran politik dan non politik. Peran non politik yaitu melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (CSO) Spedagi yang memberikan kontribusi melalui program “Gerakan Revitalisasi Desa”. Program tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi desa dan menjadikan desa yang berkelanjutan.</p>

			Program tersebut juga melibatkan CSO Spedagi yang bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh Desa Ngadimulyo Temanggung.
8.	(Eka Rahmawati, 2015)	<i>Gender Discourse and Women Movements in Nahdlatul Ulama (NU).</i>	Penelitian ini membahas mengenai pemikiran gender di NU yang mulai berkembang secara dinamis sejak masuknya wacana gender yang dibawa oleh aktivis <i>gender</i> NU pada tahun 1990-an. Masuknya wacana baru yang dibawa oleh sebagian aktivis gender NU mengakibatkan terjadinya perbedaan pemikiran di kalangan aktivis gender NU. Pemikiran gender dan gerakan perempuan di NU bersifat dinamis dan politis karena masing-masing aktor yang terlibat di dalamnya berusaha saling mempengaruhi dan mendominasi di kedua negara.
9.	(Anam, 2020)	Pola lembaga keagamaan dalam merespon wabah <i>covid-19</i> .	Penelitian ini membahas mengenai pola lembaga keagamaan dengan menerbitkan surat himbauan ataupun pernyataan sikap, yang menggambarkan lembaga-lembaga

			<p>tersebut tidak mengabaikan fenomena <i>Covid-19</i>. Dalam surat edarannya lembaga seperti NU, Muhammadiyah dan Persis, juga menekankan kepada lembaga dibawahnya agar membentuk Satgas terhadap Pandemi <i>Covid 19</i> berikut <i>Call-centernya</i>. Hal ini dilakukan sebagai bentuk layanan. Lembaga NU menyebutnya dengan Instruksi Pimpinan Pusat sebagai nama dari surat yang diedarkan. Istilah ini menggambarkan pada organisasi pemerintah yang menekankan pada aspek kataatan pada perintah atau aturan untuk dilaksanakan yang jika tidak dilakukan maka akan ada hukuman.</p>
10.	(Chaq, 2020)	<p>Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah <i>Covid-19</i> dan Dampaknya (Studi Fatwa MUI</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai peran dari Fatwa MUI yang ikut serta membantu menanggulangi wabah <i>covid-19</i>. Dalam hal ini, MUI meyakini aset zakat serta aset infaq dan shadaqah berpotensi untuk digunakan dalam merespon wabah</p>

		<p>Nomor 23 Tahun 2020).</p>	<p><i>COVID-19</i> dan dampaknya.. Hal tersebut sesuai dengan progress dan reseptif yang menerbitkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang zakat, infaq dan shodaqoh di masa pandemi, tepatnya pada tanggal 16 Apri 2020. Fatwa mendeklarasikan penggunaan aset zakat untuk mengatasi epidemi <i>COVID-19</i> dan dampaknya,ta'jil zakat mal, ta'jil zakat fitrah, dan kebutuhan penanggulangan wabah <i>COVID-19</i> dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat.</p>
--	--	------------------------------	--

1.5.2. Kerangka Teori

1. Civil Society

Adam Ferguson dan Adam Smith percaya bahwa masyarakat sipil adalah akumulasi dari kepentingan "ekonomi rakyat", karena kepentingan pribadi Smith akan merangsang pembentukan mereka pada awal perkembangan masyarakat sipil. Menurut penelitian (Muradi, 2016) Secara umum, sarjana ilmu sosial percaya bahwa keadaan ideal masyarakat sipil adalah hasil dari pemerintahan yang demokratis dan keberadaan sosial. Jika masyarakat sipil ingin dibentuk, demokrasi harus dibangun terlebih dahulu. Idealnya, pemerintahan yang demokratis dapat

menciptakan ruang kebebasan individu untuk berinteraksi dan berorganisasi, sehingga mendorong masyarakat sipil sebagai organisasi atau gerakan.

Mengenai hubungan antara demokrasi dan peran organisasi masyarakat sipil di dalamnya, Larry Diamond (2005) secara sistematis menyebutkan enam kontribusi masyarakat sipil terhadap proses demokrasi (Latifah & Larasati, 2018), yaitu :

1. Pertama, menyediakan penyedia sumber daya politik, ekonomi, budaya, dan moral untuk memantau dan menjaga keseimbangan penyelenggara negara.
2. Kedua, jika ada organisasi, kemajemukan yang ada dalam masyarakat sipil menjadi landasan penting bagi persaingan demokrasi.
3. Ketiga, kewarganegaraan.
4. Keempat, turut serta menjaga stabilitas nasional.
5. Kelima, menjadi sarana pendidikan kepemimpinan politik.
6. Keenam, mencegah aturan kediktatoran dan mempercepat keruntuhannya.

Masyarakat sipil dalam bahasa Indonesia berarti masyarakat sipil adalah konsep yang tidak ada kaitannya dengan "pemerintahan militer", seperti yang sering dibicarakan oleh masyarakat (Jb & Darmawan, 2016). Nurcholis Madjid lebih banyak menggunakan istilah 'civil society' saat memahami civil society. Menurutnya, civil society mengacu pada komunitas Islam di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yang merupakan masyarakat yang beradab (Setiadi, 2017). Masyarakat sipil adalah partisipan yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik itu bebas dan tidak terikat oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang merdeka dan mandiri, menjadikannya benteng sejarah oposisi dan kemitraan dengan negara dan pemerintah (Efendi, 2019).

Menurut penelitian Suroto, (2015) Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Han Chengjun mengungkapkan berbagai prasyarat:

1. Mengakui dan melindungi hak individu dan kebebasan berserikat serta kemerdekaan nasional.
2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk mengungkapkan persoalan politik.
3. Adanya gerakan sosial berdasarkan nilai-nilai budaya tertentu.
4. Ada kelompok inti dalam kelompok kelas menengah, kelompok ini berakar dalam masyarakat dan dapat mempromosikan modernisasi sosial dan ekonomi masyarakat.

Masyarakat sipil adalah ruang atau wadah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi yang dibentuk oleh masyarakat atau disebut juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (CSO) (Nandani, 2017: 20). Sebelum dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (CSO), telah dikenal dengan istilah Ornop (Organisasi Non Pemerintah) atau terjemahan dalam lingkungan nasional yaitu *NGO (Non Government Organization)*. Pilar yang berkontribusi dalam penegakan *civil society* di Indonesia antara lain adalah CSO sebagai wadah perkumpulan kegiatan mandiri dan komunikatif terhadap kasus di masyarakat. CSO merupakan sebuah ruang organisasi untuk berpartisipasi bagi kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan yang dibuat oleh masyarakat yang bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang.

2. Islamic Civil Society Organization

Organisasi masyarakat sipil adalah organisasi (mencari keuntungan) yang dibentuk oleh komunitas di luar pemerintah dan pasar komersial untuk mendukung kehidupan sosial yang menjadi perhatian bersama (Probojiwi, 2018), Organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai organisasi dalam masyarakat telah berkontribusi pada terwujudnya prinsip-prinsip masyarakat sipil yaitu adanya keberagaman dan keberagaman yang bertentangan dengan orientasi pasar (Januarti, 2015). Dalam penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan, terdapat nilai atau prinsip dasar yang dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan

masyarakat dan demokrasi. Integrasi organisasi masyarakat sipil di berbagai bidang dapat melahirkan kekuatan baru bagi pembangunan masyarakat.

Masyarakat sipil, jika digunakan dalam kata-kata Barat, maka dalam kata Muslim adalah "al-mujtama'al-madani" atau masyarakat sipil, yang membuktikan bahwa masyarakat sipil juga disebut dalam Islam (Setiadi, 2017). Sebagai sebuah agama, ajarannya sangat umum dan mencakup semua aspek; keyakinan, ibadah, akhlak, politik nasional, jika membahas para ahli masyarakat sipil, biasanya mengacu pada doktrin Islam yang ideal, yang tertulis dalam Alquran dan Sunnah Nabi. , Sambil juga melihat preseden dalam kehidupan nyata, lalu membentuk sejarah yang bisa dipelajari oleh generasi berikutnya (Masduki, 2007). Dari perspektif Barat dan Islam, secara umum, civil society atau civil society tampaknya menjadi titik persamaan dalam doktrin-doktrin dasar, dan merupakan kebutuhan universal umat manusia, termasuk peradaban, moralitas, toleransi, keterbukaan, persamaan di depan hukum, keadilan dan kemakmuran.

Pada penelitian Probosiwi dalam Augur, (2018) CSO dapat memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mempertahankan hak-hak mereka, membentuk kebijakan pemerintah dan menjalin kemitraan, serta memahami pelaksanaan program-program tersebut, yaitu :

1. Tipe pertama adalah CSO berbasis agama Meskipun mereka disebut organisasi masyarakat sipil religius, mereka tidak mempromosikan agama dalam rencana mereka. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi kesehatan, pendidikan, pertolongan sembako dan kegiatan darurat.
2. Tipe kedua adalah CSO berbasis komunitas. Mereka didasarkan pada solidaritas, pemanfaatan sumber daya dan pengembangan masyarakat.
3. Tipe ketiga adalah CSO berbasis amal organisasi masyarakat sipil. Jenis organisasi ini tidak mempertimbangkan keyakinan agama dan menyediakan layanan berbasis kemanusiaan.

4. Tipe keempat adalah CSO berbasis ahli. Organisasi sipil ini terlibat dalam bidang baru yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti lingkungan dan keuangan. Mereka memiliki departemen pengetahuan khusus dan telah mengeluarkan beberapa laporan teknis.
5. Tipe kelima adalah CSO berbasis serikat pekerja berdasarkan kepentingannya.

Menurut AZRA, (2020) Kebanyakan CSO ini pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan adalah CSO berbasis agama, khususnya Islam yang disebut sebagai 'Islamic-based mass-organization'. CSO berdiri dan berkembang sejak dasawarsa awal abad ke-20. Mereka berkembang dengan jumlah anggota dan kegiatan berbeda satu sama lain di berbagai daerah dan pelosok kepulauan nusantara. Nahdlatul Ulama (NU berdiri 1926) dan Muhammadiyah (berdiri 1912) disebut ormas Islam terbesar pertama dan kedua. Semua ormas ini sebenarnya memiliki lebih banyak komonalitas dan afinitas daripada perbedaan. Sepanjang sejarahnya, ormas ini tak pernah terlibat konflik panjang dan luas. Memang mereka secara terbuka atau diam-diam berkompetisi memajukan ormas dan jamaah masing-masing.

Menurut Sunan & Surabaya, (2017) Selain Nahdhatul Ulama yang berbasis tradisionalisme dan Muhammadiyah yang berbasis modernisme sebagai gerakan masyarakat sipil Islam terbesar di Indonesia, terdapat gerakan-gerakan lain yang berbasis fundamentalisme dan radikalisme. Sejumlah gerakan terakhir ini mengedepankan idealisme tekstualis, historis sepihak, dan a-politis. Untuk hal ini, Afadlal memberikan pemetaan pada level internasional tentang kelompok-kelompok fundamental-radikal Islam di Indonesia, yaitu :

1. Jamaah Islamiyah (JI),
2. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),
3. Hizhut Tahrir Indonesia (HTI),
4. DI/NII,

5. Jamaah Salafi (JS) Bandung,
6. Fron Pemuda Islam Surakarta (FPIS), dan
7. Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan

3. Kontribusi/Peran Civil Society Organization (CSO)

Definisi kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Depdikbud) adalah uang iuran (kepada perkumpulan dsb). Menurut penelitian Adhalia, dalam M.Fikri Alfian (2015) kontribusi bila berdasarkan asal katanya, yang diambil dari kamus bahasa Inggris yaitu *contribution* dan apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti donasi, dukungan dan bantuan. Sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk suatu kerugian atau kerugian. Kontribusi bisa berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama (Endang, Hendri, Yanti, 2018).

Menurut penelitian Juliati Aryani, Sudirman Suparmin, (2019) Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Menurut para ahli kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses (Mintalangi et al., 2019). Yang dimaksud dengan sumbangan diri tidak terbatas pada pemberian bantuan dalam bentuk uang, tetapi juga termasuk dalam bentuk bantuan lainnya, seperti bantuan personel, bantuan ideologis, bantuan materiil, dan berbagai bantuan yang dapat membantu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk berhasil mencapai tujuan bersama (Fitriyah, 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Peran adalah suatu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat

sehingga dapat dikatakan bahwa peran juga merupakan sebuah aspek yang dinamis dari suatu kedudukan. Menurut penelitian (Herdiansah, 2016) Peran organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan masyarakat meliputi:

- a. Pertama adalah pencipta pengetahuan. Organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dapat melakukan penelitian dan analisis untuk memperkuat atau mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil penelitian CSO dan NGO juga dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah.
- b. Kedua, CSO adalah saluran pengetahuan, artinya mereka berperan dalam menyebarkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh peneliti akademisi dan pemerintah untuk memahami pengambil keputusan, media, dan masyarakat dalam rangka merumuskan undang-undang, peraturan, kebijakan, dan menanggapi informasi. Inisiatif untuk membuat rekomendasi.
- c. Ketiga, organisasi sipil dan organisasi nonpemerintah dapat bertindak sebagai pelaku kebijakan, yang mewakili dan mengangkat isu-isu tertentu dan menjadi fokus proses kebijakan.
- d. Keempat, organisasi sipil dan organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai kontributor dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Kelima, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian tentang isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi terbarukan.

Menurut Teori Noeleen Heyzer memperlihatkan bahwa CSO memiliki 2 peran yaitu politik dan non politik. Di dalam bidang politik, CSO berperan sebagai media untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan di non politik CSO berperan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial- ekonomi CSO memiliki beberapa macam peranan di dalam proses pembangunan negara (Astuti, 2019) , yaitu:

- a. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama baik dalam suatu negara maupaun dengan lembaga lembaga internasional.
- b. Ikut serta mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.
- c. Memberdayakan serta mendukung masyarakat pada tingkat grassroot, yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Teori ini dipilih karena teori dari Noeleen Heyzer ini bisa memotret peran CSO menjadi dua yaitu bersifat politis dan non politis, Ketika CSO ditempatkan sebagai sebuah organisasi yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Dimana dalam hal ini pada saat Covid 19 pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam penanganan Covid 19.

1.6. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah batasan-batasan yang menjadi pedoman untuk memudahkan pencarian data dalam penelitian. Untuk memahami penafsiran dari teori-teori diatas, maka ditentukan beberapa definis konseptual, yaitu :

1. Civil Society

Civil Society atau sering disebut juga masyarakat madani adalah konsep masyarakat Islam yang ada di madinah, selain itu dapat diartikan sebagai kumpulan organisasi-organisasi yang didirikan oleh masyarakat yaitu Lembaga Sosial Masyarakat (CSO).

2. Islamic Civil Society Organization

Islamic Civil Society Organization merupakan organisasi yang dibentuk diluar pemerintah atau biasa disebut dengan NGO, yang bertujuan untuk mewujudkan membangun masyarakat sipil. Salah satu organisasi masyarakat sipil terbesar adalah Yayasan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

3. Peran CSO

Pada Teori Noeleen Heyzer memperlihatkan bahwa CSO memiliki 2 peran yaitu politik dan non politik. Di dalam bidang politik, CSO berperan sebagai media untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan di non politik CSO berperan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial- ekonomi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (CSO) memiliki beberapa macam peranan di dalam proses pembangunan negara

1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan penelitian empiris. Maka dibentukla definisi operasional Menurut Teori Noeleen Heyzer yang dibuat berdasarkan kerangka teori, tentang peran yang dijalankan oleh *civil society organizationz* atau NGO, yaitu :

Variabel	Indikator
1. Peran Politik	a. Melakukan Advokasi Kebijakan
2. Peran Non Politik	a. Melakukan penguatan kelembagaan b. Memberikan layanan kesehatan c. Melakukan edukasi kepada masyarakat d. Melakukan penguatan ekonomi

1.8. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan data untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipercaya, maka penelitian dilakukan dengan metode yang benar dan tepat.

1.8.1. Jenis Penelitian

Pada metode ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Menurut (Gunawan, 2016) Metode kualitatif adalah metode yang berusaha memahami dan menjelaskan makna peristiwa berdasarkan sudut pandang peneliti sendiri, berdasarkan interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu.. Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif menurut teori Gunawan,

karena pada penelitian ini membahas suatu pola perilaku lembaga sosial masyarakat salah satunya NU (Nahdlatul Ulama) dalam berinteraksi dengan masyarakat dalam situasi *COVID 19* yang sedang dihadapi saat ini.

1.8.2. Jenis data

Jenis data yang diperoleh berupa Data Primer dan Data Sekunder

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Adapun Sumber data utama untuk penelitian ini adalah Panitia Nahdlatul Ulama DIY.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut dapat berupa dalam bentuk dokumen-dokumen, buku, catatan, bukti otentik atau arsip-arsip. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperlukan yaitu melalui data-data yang ada di website Nahdlatul Ulama, buku, jurnal-jurnal terdahulu, berita dan lain-lainnya.

1.8.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk menggali lebih dalam mengenai Kontribusi Nadhalatul Ulama dalam Penanganan Covid 19.

- a. Teknik Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi secara langsung, dengan mengajukan beberapa opsi pertanyaan untuk narasumber. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara bersifat terstruktur dan tertutup. Pada penelitian ini yang akan diwawancarai meliputi :
 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY
 - H. Fahmy Akbar Idries, SE, MM (Wakil Ketua PWNU) dan
 - DR. Ahmad Bahiej, SH., M.HUM (Wakil Sekretaris PWNU)
 2. Satuan Tugas (Satgas) Peduli Corona (Covid 19) DIY

Khotimatul Khusna (Ketua Fatayat Organisasi Pemuda NU)

Dr. Achmad Ali Machfud (Ketua Lembaga Kesehatan PWNNU DIY)

- b. Teknik Dokumentasi adalah Dokumentasi merupakan suatu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berisikan data-data penting dari masa lalu yang meliputi :
1. Website Nahdlatul Ulama (NU),
 2. Buku,
 3. Artikel, dan
 4. Jurnal terdahulu.

1.8.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan (Ajif, 2013). Transformasi data menjadi informasi agar karakteristik data mudah dipahami dan berguna untuk menemukan solusi masalah (terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian).

a. Reduksi Data

Reduksi data pada penelitian Oliver, (2019) merupakan Proses seleksi berfokus pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data asli yang dihasilkan dari catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Proses ini berlangsung selama peneliti ingin mendapatkan data informasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat serta pengumpulan data yang sesuai. Pada penelitian ini tahap reduksi data yang akan dilakukan yaitu mengelompokkan data-data yang penting dan membuang yang tidak penting, sehingga mempermudah peneliti untuk pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data berfungsi sebagai sekumpulan informasi tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 1992 : 17). Pada penelitian ini tahap penyajian data yang akan dilakukan yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dengan bagan, yang diperoleh dari kumpulan dari sumber-sumber data atau informan. Sehingga peneliti dalam hal ini akan mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain.

c. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. dilakukan oleh peneliti saat mencari data selama di lapangan. Dimulai dengan teknik pengumpulan data, mencatat hal penting dalam teori, menjelaskan kesimpulan berdasarkan alur sebab dan akibat. Kesimpulan ini diambil secara umum berdasarkan penarikan data yang diperoleh saat penelitian. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masih bersifat sementara akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.